



# RENCANA KERJA (RENJA)

DPPKBP3A  
KABUPATEN  
BANYUMAS

# 2024

RENCANA KERJA (RENJA)  
DPPKBP3A KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2024



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN BANYUMAS

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2024 ini dilaksanakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya seperti Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Penyusunan Renja DPPKBP3A Tahun 2024 ini juga sebagai perwujudan penerapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah. Terkait hal tersebut, tentunya secara teknis masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, untuk itu kami mohon koreksi dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan selanjutnya.

Demikian Renja DPPKBP3A ini Kami susun, semoga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan selanjutnya dan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa datang.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2024. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD; RPJMD; Renstra SKPD; RKPD; dan RENJA SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2024, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Banyumas Tahun 2005 - 2025 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 yaitu :

**” Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing serta Mandiri”**

Visi RPJPD Kabupaten Banyumas tahun 2005-2025 dijabarkan ke dalam empat misi, yaitu:

1. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera;
2. Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri;
3. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing;
4. Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Lestari.

Rencana Kerja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal-Pemalang;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Banyumas Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan, Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
22. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas;
23. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026
24. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2024 adalah untuk:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2024 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2024.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Sebagian pedoman Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas selama tahun 2024.

#### **1.4. SISTEMATIKA**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,** memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing



Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

**2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,** berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

**2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD,** menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,** dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrembang kecamatan.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM**

**3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

**3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

**3.3 Program dan kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal

RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

menguraikan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat dalam matrik renja Perangkat Daerah.

#### **BAB V PENUTUP**

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**  
**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

**2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

**A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

## **B. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

### **Evaluasi Program Tahun 2022**

Pelaksanaan program dan kegiatan pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022. Jumlah anggaran belanja pada APBD Induk Tahun 2022 sebesar Rp. 30.488.024.206,00. Terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 29.783.455.706,00 dan belanja modal sebesar Rp 704.568.500,00.

Penyerapan anggaran tertinggi dan terendah yaitu pada program:

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) (anggaran Rp. 35.000.000,00 dengan realisasi Rp. 34,982.500,00) tertinggi 99,95 %;
2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (anggaran Rp. 8.101.240.000,00 dengan realisasi Rp. 4.967.185.000,00) terendah 61,31 %;

DPPKBP3A Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu terdiri dari 10 program dan 23 kegiatan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi DPPKBP3A Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam tabel T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat  
Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
(tahun berjalan) DPPKBP3A Kabupaten Banyumas

Nama Perangkat Daerah: DPPKBP3A

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d (n-3) Tahun 2021	Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2022	Tingkat Realisasi %	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2023	Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
[TUJUAN]Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk										
[INDTUJUAN]	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1.77	0.95	1.78	0.811	154.44	1.77	N/A	N/A
[SASARAN]Menurunnya laju pertumbuhan penduduk										
[INDSASARAN]	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0.01	0.47	0.01	0.55	5500	0.01	N/A	N/A
[PROGRAM]PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
[INDPROGRAM]	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPPKBP3A	%	100	100	100	100	100	100	100	100
[INDPROGRAM]	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai DPPKBP3A	%	100	100	100	100	100	100	100	100
[INDPROGRAM]	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah DPPKBP3A	%	100	100	100	100	100	100	100	100
[INDPROGRAM]	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah DPPKBP3A	%	100	100	100	100	100	100	100	100
[KEGIATAN]Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
[INDKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	dokumen	4					4	2	50
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3					3	2	66.67

[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1				1	0	0	
[KEGIATAN]Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	jenis	3				3	3	100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	33				33	33	100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3				3	1	33.33	
[KEGIATAN]Administrasi Umum Perangkat Daerah										
[INDKEGIATAN]	Jumlah administrasi umum yang dikelola	jenis	6				6	6	100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1				1	1	100	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1				1	0	0	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1				1	0	0	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5				5	2	40	
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2				2	1	50	

[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	35					35	35	100
[KEGIATAN]Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
[INDKEGIATAN]	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	jenis	3					3	3	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1					1	0	0
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5					5	2	40
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1					1	0	0
[KEGIATAN]Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
[INDKEGIATAN]	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	jenis	3					3	3	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12					12	6	50
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1					1	1	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12					12	6	50
[KEGIATAN]Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
[INDKEGIATAN]	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan	jenis	4					4	4	100

[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	130					130	64	49.23
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	1					1	1	100
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10					10	7	70
[SUBKEGIATAN]X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1					1	1	100
[PROGRAM]PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK										
[INDPROGRAM]	Rata-rata jumlah anak per keluarga	anak	2	0.79	2.40	0.99	158.75	2	0	0
[KEGIATAN]Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk										
[INDKEGIATAN]	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Kebijakan	1					1	0	0
[SUBKEGIATAN]2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1					1	0	0
[SUBKEGIATAN]2.14.02.2.01.05 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dokumen	1					1	0	0



[SUBKEGIATAN]2.14.02.2.01.11 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan											
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Dokumen	1					1	0	0	
[KEGIATAN]Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											
[INDKEGIATAN]	Jumlah informasi data mikro keluarga setiap desa yang dilaporkan	informasi	331					331	331	100	
[SUBKEGIATAN]2.14.02.2.02.02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan											
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Dokumen	1					1	1	100	
[SUBKEGIATAN]2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB											
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	12					12	6	50	
[PROGRAM]PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)											
[INDPROGRAM]	Rasio Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
[INDPROGRAM]	Presentase Kampung KB yang terfasilitasi	%	80	50	65	65	100	80	30.21	37.76	
[INDPROGRAM]	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	42	46.37	41.00	45.15	110.12	42	47.04	112	
[KEGIATAN]Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal											
[INDKEGIATAN]	Jumlah Penyuluhan oleh PLKB/PKB yang dilaksanakan	kegiatan	640					640	360	56.25	
[SUBKEGIATAN]2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal											
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen	1					1	1	100	
[SUBKEGIATAN]2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK											

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	0					0	0	
[SUBKEGIATAN]2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	2					2	0	0
[SUBKEGIATAN]2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	2					2	0	0
[SUBKEGIATAN]2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	12					12	6	50
[SUBKEGIATAN]2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	1					1	1	100
[KEGIATAN]Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)										
[INDKEGIATAN]	Jumlah Petugas Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	orang	331					331	331	100
[SUBKEGIATAN]2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	0					0	331	

[KEGIATAN]Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota										
[INDKEGIATAN]	Jumlah fasilitas kesehatan yang tercukupi alat dan obat kontrasepsinya	Unit	70					70	70	100
[SUBKEGIATAN]2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	6					6	1	16.67
[SUBKEGIATAN]2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	4911					4911	5616	114.36
[SUBKEGIATAN]2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	10					10	10	100
[SUBKEGIATAN]2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1					1	0	0
[KEGIATAN]Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB										
[INDKEGIATAN]	Jumlah Kampung KB yang aktif	Desa	200					200	100	50
[SUBKEGIATAN]2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB										

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung	170					170	77	45.29
[PROGRAM]PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)										
[INDPROGRAM]	Persentase Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	26	7.41	18.52	7.41	40.01	26	7.42	28.54
[KEGIATAN]Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga										
[INDKEGIATAN]	Jumlah Kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan	kelompok	20					20	20	100
[SUBKEGIATAN]2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit	20					20	0	0
[SUBKEGIATAN]2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kelompok	1000					1000	250	25
[SUBKEGIATAN]2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1					1	0	0
[SUBKEGIATAN]2.14.04.2.01.14 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas										

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	10					10	10	100
[TUJUAN]Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak										
[INDTUJUAN]	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		71.94	71.74	71.93	72.77	97.46	71.94	N/A	N/A
[INDTUJUAN]	Nilai Kabupaten Layak Anak		650			595		650	N/A	N/A
[SASARAN]Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan										
[INDSASARAN]	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		71.94	71.74	71.93	70.1	97.46	71.94	N/A	N/A
[PROGRAM]PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN										
[INDPROGRAM]	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	100	100	100	100	100	100	100
[INDPROGRAM]	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD.	%	22	22	22	22	100	22	22	100
[KEGIATAN]Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota										
[INDKEGIATAN]	Jumlah OPD yang menerapkan PUG	OPD	29					29	29	100
[SUBKEGIATAN]2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2					2	2	100
[KEGIATAN]Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota										
[INDKEGIATAN]	Jumlah keterlibatan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	orang	11					11	11	100
[SUBKEGIATAN]2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1					1	1	100

[SUBKEGIATAN]2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	30					30	16	53.33
[KEGIATAN]Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										
[INDKEGIATAN]	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang berperan aktif	lembaga	45					45	45	100
[SUBKEGIATAN]2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1					1	0	0
[PROGRAM]PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN										
[INDPROGRAM]	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
[KEGIATAN]Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										
[INDKEGIATAN]	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	kasus	73					73	15	168.49
[SUBKEGIATAN]2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2					2	1	50
[SUBKEGIATAN]2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										

[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	3					3	1	33.33
[KEGIATAN]Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota										
[INDKEGIATAN]	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan	kasus	17					17	11	64.71
[SUBKEGIATAN]2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	52					52	15	28.85
[KEGIATAN]Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
[INDKEGIATAN]	Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan yang berperan aktif UPTD Perlindungan Perempuan dan anak	lembaga	1					1	1	100
[SUBKEGIATAN]2.08.03.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1					1	0	0
[SUBKEGIATAN]2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1					1	1	100
[PROGRAM]PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA										
[INDPROGRAM]	Persentase keluarga yang mendapat pengarahannya terkait peningkatan kualitas keluarga	%	0	0.2	0.01	0.036	360	0		

[KEGIATAN]Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
[INDKEGIATAN]	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan	kegiatan	2					2	0	0
[SUBKEGIATAN]2.08.04.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	6					6	0	0
[PROGRAM]PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK										
[INDPROGRAM]	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	%	43	0	35.71	34.48	96.56	43	34.48	80.19
[KEGIATAN]Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
[INDKEGIATAN]	Jumlah laporan data gender dan anak yang tersedia	laporan	1					1	0	0
[SUBKEGIATAN]2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1					1	0	0
[SASARAN]Meningkatkan kualitas perlindungan anak										
[INDSASARAN]	Nilai Kabupaten Layak Anak		650	595	625	595	95.2	650	N/A	N/A
[PROGRAM]PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)										
[INDPROGRAM]	Persentase lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar yang aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
[KEGIATAN]Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										
[INDKEGIATAN]	Jumlah Lembaga Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang sesuai standar dan aktif (Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan)	lembaga	28					28	28	100



[SUBKEGIATAN]2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	28					28	28	100
[PROGRAM]PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK										
[INDPROGRAM]	Rasio anak korban kekerasan	Angka	0	0.016	0.009	0.0144	40	0	0.006	
[KEGIATAN]Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										
[INDKEGIATAN]	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak	kasus	50					50	19	38
[SUBKEGIATAN]2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	2					2	1	50
[KEGIATAN]Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
[INDKEGIATAN]	Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan	kasus	63					63	34	53.97
[SUBKEGIATAN]2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota										
[INDSUBKEGIATAN]	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	62					62	34	54.84

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

#### **1. Tugas Pokok**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah yang diberikan kepada kabupaten.

#### **2. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Advokas, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- c. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi, bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang Pemberdayaan Perempuan dan bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- d. Pelaksanaan administrasi kedinasan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
- Adapun susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Koordinator Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
    1. Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi;
    2. Sub Koordinator Pendayagunaan Penyuluhan KB; dan
    3. Sub Koordinator Data dan Informasi;
  - d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari
    1. Sub Koordinator Pelayanan KB; dan
    2. Sub Koordinator Keluarga Sejahtera;
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
    1. Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan; dan
    2. Sub Koordinator Perlindungan Hak Perempuan;
  - f. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari :
    1. Sub Koordinator Perlindungan Anak; dan
    2. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak;
  - g. UPTD
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2023**

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja Langsung tahun 2023 dengan anggaran DPA Induk sebesar Rp.29.941.640.277,00 terurai dalam 10 program dan 24 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2022, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

No	Indikator	Target 2023	Realisasi		Perkiraan Capaian	Kenaikan/ Penurunan
			2022	2021		
1	2	3		4	6	7
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,77	0,811	0,95	0,91	
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,94	72,77	71,74	72,78	
3	Kabupaten Layak Anak (KLA)	650	595	595	600	
4	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	0,01	0,55	0,47	0,01	

### **2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023 dapat dikemukakan beberapa hal dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

- a. Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk;
- b. Belum optimalnya kualitas pembangunan perempuan;
- c. Belum optimalnya kualitas pemberdayaan perempuan;
- d. Belum optimalnya kualitas perlindungan anak.

#### **Permasalahan**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Treatment*). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas. Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

#### **A. *Strength* (Kekuatan)**

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. SDM Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 33 orang yang terdiri dari : pendidikan S-2 sebanyak 6 orang atau 18,18 %, S-1 sebanyak 18 orang atau 54,54 %, pendidikan SMA sebanyak 5 orang atau 15,15 %, pendidikan SMP sebanyak 1 orang atau 3,03

%, Dilihat dari pendidikan reguler, pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas, sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Sarana dan Prasarana

Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sudah cukup memadai, baik aset yang bergerak maupun tidak bergerak.

4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2021. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas di dalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

B. *Weakness* (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsi teknis operasional urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kita juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut yaitu adanya masalah-masalah terkait dengan teknis operasional urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain:

1. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
- b. Belum optimalnya ketersediaan dan akurasi data untuk keperluan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

2. Permasalahan terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- a. Keterbatasan jumlah SDM dan kompetensi teknis pada unit lini (Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak hanya 1 ASN);
- b. Kesetaraan gender yang belum optimal dibandingkan dengan kondisi Pemerintah Provinsi Jateng dan kabupaten sekitar

- ditunjukkan dengan nilai capaian IDG dan IPG yang masih di bawah provinsi dan kabupaten sekitar;
- c. Masih rendahnya persentase perempuan di lembaga legislatif;
  - d. Belum optimalnya keaktifan dan optimalisasi organisasi di bidang pemberdayaan perempuan;
  - e. Belum optimalnya Kegiatan Kelembagaan PUG pada Instansi Pemerintah;
  - f. Masih tingginya kekerasan terhadap anak berdasarkan rasio anak korban kekerasan yang tinggi;
  - g. Belum terpenuhinya standar untuk Kabupaten Layak Anak dan belum optimalnya pemenuhan hak-hak anak ditunjukkan dengan belum tercapainya indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
  - h. Belum tersedianya Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) secara merata (tiap OPD) sesuai standar;
  - i. Jumlah Forum Anak yang aktif belum merata (Forum Anak tingkat kecamatan dan desa);
  - j. Belum terlaksananya Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif.
3. Permasalahan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :
- a. Pertumbuhan penduduk yang masih belum terkendalkan berdasarkan hasil indikator LPP;
  - b. Rata-rata jumlah anak per keluarga masih belum dapat dikendalikan;
  - c. Menurunnya tingkat keberlangsungan peserta KB aktif (meningkatnya *unmetneed*);
  - d. Permasalahan *stunting* yang belum terkendali;
  - e. Semakin berkurangnya PLKB/PKB (tersisa 93 orang), mengingat ratio petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas mengampu 2(dua) desa/kelurahan lebih;
  - f. Belum semua Kampung KB melaksanakan kegiatan dengan baik dan optimal hal ini di tandai dengan masih rendahnya Persentase Perangkat Daerah (Dinas / Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB.

### C. *Opportunity* (Peluang)

Dari analisis *strength* dan *weakness*, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Peluang-peluang tersebut adalah:

1. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJPD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
2. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP;
3. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030);
4. Meningkatnya komitmen dan dukungan Pemerintah dalam kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak-hak anak;
5. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Komitmen dan dukungan Pemerintah dalam pembiayaan (DAK/APBD) yang berkelanjutan dalam pembangunan dan pengembangan Keluarga Berencana;
7. Kesadaran masyarakat dalam berorganisasi baik di perkotaan dan pedesaan guna mengintegrasikan program-program pemerintah.

### D. *Treatment* (Ancaman)

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait perspektif gender.
2. Permasalahan perekonomian (kemiskinan) yang berdampak pada permasalahan keluarga dan meningkatnya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap anak (tenaga kerja belia).
3. Kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan pengetahuan dan adaptasi yang baik di masyarakat berdampak pada pola kehidupan konsumerisme.
4. Pola pikir masyarakat yang semakin heterogen sehingga berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program pemerintah seperti Program KB.
5. Persoalan pola asuh dalam keluarga yang berimbas pada belum terkendalinya stuntung.

Berdasarkan analisa SWOT di atas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan di atas.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:



1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- ✓ Masih minimnya keterlibatan stakeholders (bidang-bidang terkait) perangkat daerah pada setiap proses penyusunan perencanaan pembangunan;
- ✓ Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan yang terkait dengan dokumen perencanaan;
- ✓ Pelaksanaan perencanaan tidak tepat waktu karena mekanisme tahapan panjang dan melibatkan banyak pihak dengan peraturan perundangan yang dinamis;
- ✓ Tuntutan manajemen yang seringkali tidak sinkron dengan perencanaan yang sudah dibuat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DPPKBP3A di atas, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak perlu dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah DPPKBP3A Kabupaten Banyumas tahun 2024 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang telah ditempuh DPPKBP3A Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas analisis dalam perencanaan di lingkungan perangkat daerah;
2. Meningkatkan kesesuaian antara capaian kinerja OPD terhadap RPJMD;
3. Meningkatkan realisasi pelaksanaan kegiatan perangkat daerah;
4. Meningkatkan fasilitasi penerapan inovasi perangkat daerah;
5. Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan informasi perencanaan;
6. Meningkatkan kualitas analisis dalam perencanaan bidang perangkat daerah;
7. Meningkatkan pelayanan perkantoran;
8. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan internal perangkat daerah.

#### **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Rancangan awal RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada lampiran tabel C-T.31. Rancangan awal RKPD tahun 2024 menunjukkan DPPKBP3A memiliki 10 program dan 24 kegiatan.

**Tabel T-C.31.**  
**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023**  
**DPPKBP3A Kabupaten Banyumas**  
**Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22,639,700,000		22,939,700,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			919,600,000		959,600,000
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			280,000,000		295,000,000
	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100%		100%	
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	22%		24%	
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			40,000,000		45,000,000
	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten kota yang telah dilatih PUG	29 Perangkat Daerah		29 Perangkat Daerah	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			40,000,000		45,000,000
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			180,000,000		185,000,000
	Jumlah keterlibatan perempuan di bidang politik hukum sosial dan ekonomi	12 Orang		12 Orang	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			30,000,000		35,000,000
	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang		90 Orang	

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			150,000,000		150,000,000
	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	33 organisasi		36 organisasi	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			60,000,000		65,000,000
	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten kota yang mendapatkan pelatihan	45 Lembaga		46 Lembaga	
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			60,000,000		65,000,000
	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit		4 Unit	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			250,000,000		259,500,000
	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%		100%	
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			75,000,000		77,000,000
	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	50 Kasus		49 Kasus	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			50,000,000		50,000,000
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			25,000,000		27,000,000
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Perangkat Daerah		14 Perangkat Daerah	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			110,000,000		110,000,000
	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan	15 Kasus		17 Kasus	

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			110,000,000		110,000,000
	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan		6 Layanan	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			65,000,000		72,500,000
	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1 Lembaga		1 Lembaga	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			45,000,000		50,000,000
	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			20,000,000		22,500,000
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			30,000,000		33,500,000
	Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga	0.03 %		0.033 %	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			30,000,000		33,500,000
	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan	1 Keg		1 Keg	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			30,000,000		33,500,000
	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Perangkat Daerah		17 Perangkat Daerah	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			20,000,000		25,000,000
	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	41.37 %		44.82 %	

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20,000,000		25,000,000
	Jumlah laporan data gender dan anak yang tersedia	1 Laporan		1 Laporan	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			20,000,000		25,000,000
	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			75,000,000		82,000,000
	Persentase lembaga layanan anak yang telah mendapatkan advokasi	85%		90%	
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			35,000,000		37,000,000
	Jumlah kegiatan advokasi bagi lembaga layanan anak	2 Keg		2 Keg	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			35,000,000		37,000,000
	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 organisasi		33 organisasi	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			40,000,000		45,000,000
	Jumlah lembaga pemerintah yang telah menerapkan kriteria kabupaten layak anak	20 Perangkat Daerah		23 Perangkat Daerah	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			40,000,000		45,000,000
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			264,600,000		264,600,000
	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%		100%	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			64,600,000		64,600,000
	Jumlah media massa yang bekerja sama dengan pemkab dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	3 Lembaga		3 Lembaga	
			64,600,000		64,600,000

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	200 Orang		200 Orang	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan	60 anak	200,000,000	61 anak	200,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	63 Orang	200,000,000	64 Orang	200,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			21,720,100,000		21,980,100,000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total atau TFR	2.00 Angka	400,000,000	1.95 Angka	424,000,000
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	114,000,000
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	60,000,000
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	1 Keg	25,000,000	1 Keg	27,000,000
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1 Keg	25,000,000	1 Keg	27,000,000
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kelahiran Remaja atau ASFR	10.5 Angka	300,000,000	10.3 Angka	310,000,000
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan			50,000,000		60,000,000

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	12 Dokumen		12 Dokumen	
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			250,000,000		250,000,000
	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen		12 Dokumen	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			12,741,100,000		12,966,100,000
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	43.50 %		43.60 %	
	Presentase Kampung KB yang terfasilitasi	85%		90%	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			12,741,100,000		12,966,100,000
	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK advokasi dan KIE serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	81%		82%	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			2,720,000,000		2,845,000,000
	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	31%		31.05 %	
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal			1,000,000,000		1,100,000,000
	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2 Dokumen		3 Dokumen	
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			200,000,000		200,000,000
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen		4 Dokumen	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			550,000,000		575,000,000



URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	3 Laporan		4 Laporan	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK			850,000,000		850,000,000
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan		12 Laporan	
Pengendalian Program KKBPK			120,000,000		120,000,000
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan		2 Laporan	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			5,021,100,000		5,021,100,000
	Persentase fasilitas kesehatan yang siap melayani KB MKJP	60%		62%	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			71,100,000		71,100,000
	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan		12 Laporan	
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			3,700,000,000		3,700,000,000
	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	92930 Orang		93000 Orang	
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			1,100,000,000		1,100,000,000
	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	10 Unit		10 Unit	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya			150,000,000		150,000,000
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan		2 Laporan	

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			5,000,000,000		5,100,000,000
	Jumlah stakeholders atau pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	23 Lembaga		25 Lembaga	
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB			5,000,000,000		5,100,000,000
	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	170 Kampung		180 Kampung	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			8,579,000,000		8,590,000,000
	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran PBI	73%		73.10 %	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			8,579,000,000		8,590,000,000
	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI	90000 Orang		90100 Orang	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			400,000,000		400,000,000
	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit		20 Unit	
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			8,100,000,000		8,100,000,000
	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1269 Kelompok		1269 Kelompok	
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			39,000,000		40,000,000
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan		1 Laporan	
			40,000,000		50,000,000

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	25 Keluarga		30 Keluarga	
NON URUSAN			8,812,651,000		9,242,731,000
NON URUSAN			8,812,651,000		9,242,731,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8,812,651,000		9,242,731,000
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%		100%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40,000,000		41,000,000
	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			20,000,000		20,000,000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20,000,000		21,000,000
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,350,000,000		4,455,000,000
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4,200,000,000		4,300,000,000
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan		33 Org/bulan	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			150,000,000		155,000,000
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			977,000,000		1,013,000,000
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis		7 Jenis	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			30,000,000		35,000,000
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			60,000,000		63,000,000
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		3 Paket	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			22,000,000		25,000,000
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			370,000,000		380,000,000
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			50,000,000		55,000,000
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			435,000,000		445,000,000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210 Laporan		215 Laporan	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			10,000,000		10,000,000
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			285,000,000		297,000,000
	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis		3 Jenis	
Pengadaan Mebel			25,000,000		27,000,000
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		4 Unit	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			230,000,000		235,000,000
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		12 Unit	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			30,000,000		35,000,000
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		3 Unit	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,415,000,000		2,661,731,000

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis		3 Jenis	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			85,000,000		86,000,000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30,000,000		35,000,000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2,300,000,000		2,540,731,000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			745,651,000		775,000,000
	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis		4 Jenis	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			355,651,000		360,000,000
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	130 Unit		130 Unit	
Pemeliharaan Mebel			40,000,000		45,000,000
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			170,000,000		180,000,000
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		13 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			180,000,000		190,000,000
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	
			135,000,000		135,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			100,000,000		100,000,000

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			100,000,000		100,000,000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			100,000,000		100,000,000
	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%		100%	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100,000,000		100,000,000
	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 Lembaga		1 Lembaga	
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/			100,000,000		100,000,000
	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	1 Dokumen		1 Dokumen	
NON URUSAN			35,000,000		35,000,000
NON URUSAN			35,000,000		35,000,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			35,000,000		35,000,000
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%		100%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			25,000,000		25,000,000
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Jenis		3 Jenis	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10,000,000		10,000,000
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5,000,000		5,000,000
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10,000,000		10,000,000
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10,000,000		10,000,000
	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Jenis		1 Jenis	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			10,000,000		10,000,000

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	

## 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mengakomodir usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga lainnya yang langsung ditujukan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel C-T.32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024  
Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas

Nama Perangkat Daerah : DPPKBP3A

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	<b>Program</b> Pengarus utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Perempuan				
	<b>Kegiatan</b> Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
	<b>Sub Kegiatan</b> <i>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah kegiatan KIE PP untuk kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yang dilaksanakan	Desa di lingkungan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas	5 keg	Pelatihan bagi perempuan Rp. 200.000.000 (Pokir),



**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

DPPKBP3A sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah (Dinas) yang melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Banyumas, membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten, dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk kebijakan teknis di bidang pengendalian Penduduk dan KB serta pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Rencana pembangunan disesuaikan dengan visi misi RPJPD 2005-2025. ” **Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing serta Mandiri**”

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk
Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan
	Meningkatkan kualitas perlindungan anak

### **3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. DPPKBP3A sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Dinas yang melaksanakan melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Banyumas di Kab. Banyumas. Tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPKBP3A dalam rangka mendukung Bupati Banyumas dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

DPPKBP3A mempunyai 10 program dan 25 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh empat bidang dan sekretariat serta sub unit kerja UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Berikut merupakan total kebutuhan dana tahun 2024 yaitu Rp 31.957.351.000,00 dengan sumber pendanaan APBD Kabupaten sebesar Rp 9.837.651.000,00 , APBD Provinsi Rp 0 dan APBN Rp 22.119.700.000,00. Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 pada tabel T-C.33:

Tabel T-C.33

**Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Peralihan 2024-2026  
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Kabupaten Banyumas**

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22,639,700,000		22,939,700,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			919,600,000		959,600,000
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	- Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100%	280,000,000	100%	295,000,000
	- Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	22%		24%	
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			40,000,000		45,000,000
	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten kota yang telah dilatih PUG	29 Perangkat Daerah		29 Perangkat Daerah	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			40,000,000		45,000,000
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			180,000,000		185,000,000
	Jumlah keterlibatan perempuan di bidang politik hukum sosial dan ekonomi	12 Orang		12 Orang	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			30,000,000		35,000,000
	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang		90 Orang	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			150,000,000		150,000,000
	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	33 organisasi		36 organisasi	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			60,000,000		65,000,000
	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten kota yang mendapatkan pelatihan	45 Lembaga		46 Lembaga	
			60,000,000		65,000,000

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit		4 Unit	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			250,000,000		259,500,000
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%		100%	
	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	50 Kasus	75,000,000	49 Kasus	77,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			50,000,000		50,000,000
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			25,000,000		27,000,000
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Perangkat Daerah		14 Perangkat Daerah	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			110,000,000		110,000,000
	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan	15 Kasus		17 Kasus	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			110,000,000		110,000,000
	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan		6 Layanan	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			65,000,000		72,500,000
	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1 Lembaga		1 Lembaga	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			45,000,000		50,000,000
	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			20,000,000		22,500,000
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			30,000,000		33,500,000
	Persentase keluarga yang mendapat pengarahannya terkait peningkatan kualitas keluarga	0.03 %		0.033 %	

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			30,000,000		33,500,000
	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan	1 Keg		1 Keg	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			30,000,000		33,500,000
	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Perangkat Daerah		17 Perangkat Daerah	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			20,000,000		25,000,000
	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	41.37 %		44.82 %	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20,000,000		25,000,000
	Jumlah laporan data gender dan anak yang tersedia	1 Laporan		1 Laporan	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			20,000,000		25,000,000
	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			75,000,000		82,000,000
	Persentase lembaga layanan anak yang telah mendapatkan advokasi	85%		90%	
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			35,000,000		37,000,000
	Jumlah kegiatan advokasi bagi lembaga layanan anak	2 Keg		2 Keg	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			35,000,000		37,000,000
	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 organisasi		33 organisasi	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			40,000,000		45,000,000
	Jumlah lembaga pemerintah yang telah menerapkan kriteria kabupaten layak anak	20 Perangkat Daerah		23 Perangkat Daerah	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			40,000,000		45,000,000
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			264,600,000		264,600,000
	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%		100%	

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			64,600,000		64,600,000
	Jumlah media massa yang bekerja sama dengan Pemkab dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	3 Lembaga		3 Lembaga	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			64,600,000		64,600,000
	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	200 Orang		200 Orang	
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			200,000,000		200,000,000
	Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan	60 anak		61 anak	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			200,000,000		200,000,000
	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	63 Orang		64 Orang	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			21,720,100,000		21,980,100,000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			400,000,000		424,000,000
	Angka Kelahiran Total atau TFR	2.00 Angka		1.95 Angka	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			100,000,000		114,000,000
	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1 Dokumen		1 Dokumen	
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			50,000,000		60,000,000
	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal			25,000,000		27,000,000
	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	1 Keg		1 Keg	
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan			25,000,000		27,000,000
	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1 Keg		1 Keg	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			300,000,000		310,000,000
	Angka Kelahiran Remaja atau ASFR	10.5 Angka		10.3 Angka	
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan			50,000,000		60,000,000
	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	12 Dokumen		12 Dokumen	
			250,000,000		250,000,000

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen		12 Dokumen	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			12,741,100,000		12,966,100,000
	- Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	43.50 %		43.60 %	
	- Presentase Kampung KB yang terfasilitasi	85%		90%	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			12,741,100,000		12,966,100,000
	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK advokasi dan KIE serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	81%		82%	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			2,720,000,000		2,845,000,000
	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	31%		31.05 %	
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal			1,000,000,000		1,100,000,000
	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2 Dokumen		3 Dokumen	
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			200,000,000		200,000,000
	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen		4 Dokumen	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			550,000,000		575,000,000
	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	3 Laporan		4 Laporan	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK			850,000,000		850,000,000
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan		12 Laporan	
Pengendalian Program KKBPK			120,000,000		120,000,000
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan		2 Laporan	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			5,021,100,000		5,021,100,000
	Persentase fasilitas kesehatan yang siap melayani KB MKJP	60%		62%	
			5,021,100,000		5,021,100,000

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang siap melayani KB MKJP	60%		62%	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	71,100,000	12 Laporan	71,100,000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	92930 Orang	3,700,000,000	93000 Orang	3,700,000,000
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	10 Unit	1,100,000,000	10 Unit	1,100,000,000
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	150,000,000	2 Laporan	150,000,000
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholders atau pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	23 Lembaga	5,000,000,000	25 Lembaga	5,100,000,000
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	170 Kampung	5,000,000,000	180 Kampung	5,100,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran PBI	73%	8,579,000,000	73.10 %	8,590,000,000
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI	90000 Orang	8,579,000,000	90100 Orang	8,590,000,000
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	400,000,000	20 Unit	400,000,000
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1269 Kelompok	8,100,000,000	1269 Kelompok	8,100,000,000



URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			39,000,000		40,000,000
	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan		1 Laporan	
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			40,000,000		50,000,000
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	25 Keluarga		30 Keluarga	
NON URUSAN			8,812,651,000		9,242,731,000
NON URUSAN			8,812,651,000		9,242,731,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			8,812,651,000		9,242,731,000
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%		100%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40,000,000		41,000,000
	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			20,000,000		20,000,000
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			20,000,000		21,000,000
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,350,000,000		4,455,000,000
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4,200,000,000		4,300,000,000
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan		33 Orang/bulan	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			150,000,000		155,000,000
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			977,000,000		1,013,000,000
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis		7 Jenis	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			30,000,000		35,000,000
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			60,000,000		63,000,000

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		3 Paket	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			22,000,000		25,000,000
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			370,000,000		380,000,000
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			50,000,000		55,000,000
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			435,000,000		445,000,000
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210 Laporan		215 Laporan	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			10,000,000		10,000,000
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			285,000,000		297,000,000
	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis		3 Jenis	
Pengadaan Mebel			25,000,000		27,000,000
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		4 Unit	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			230,000,000		235,000,000
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		12 Unit	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			30,000,000		35,000,000
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		3 Unit	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2,415,000,000		2,661,731,000
	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis		3 Jenis	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			85,000,000		86,000,000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			30,000,000		35,000,000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2,300,000,000		2,540,731,000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	
			745,651,000		775,000,000

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis		4 Jenis	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			355,651,000		360,000,000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	130 Unit		130 Unit	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	40,000,000	5 Unit	45,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			170,000,000		180,000,000
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		13 Unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			180,000,000		190,000,000
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	
UPTD			135,000,000		135,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			100,000,000		100,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			100,000,000		100,000,000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			100,000,000		100,000,000
	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%		100%	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			100,000,000		100,000,000
	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 Lembaga		1 Lembaga	
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/			100,000,000		100,000,000
	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	1 Dokumen		1 Dokumen	
NON URUSAN			35,000,000		35,000,000
NON URUSAN			35,000,000		35,000,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			35,000,000		35,000,000
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%		100%	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			25,000,000		25,000,000
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Jenis		3 Jenis	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			10,000,000		10,000,000
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5,000,000		5,000,000
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10,000,000		10,000,000
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			10,000,000		10,000,000
	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Jenis		1 Jenis	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			10,000,000		10,000,000
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2024 ditunjukkan pada lampiran matrik renja yang telah disesuaikan dengan Renstra Peralihan 2024-2026 sebagai berikut:

**Matrik Tahun 2024 berdasarkan Renstra Peralihan 2024-2026  
DPPKBP3A Kabupaten Banyumas**

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22,639,700,000		22,939,700,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			919,600,000		959,600,000
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG</li> <li>- Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD</li> </ul>	100% 22%	280,000,000	100% 24%	295,000,000
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten kota yang telah dilatih PUG	29 Perangkat Daerah	40,000,000	29 Perangkat Daerah	45,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	40,000,000	2 Dokumen	45,000,000
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan perempuan di bidang politik hukum sosial dan ekonomi	12 Orang	180,000,000	12 Orang	185,000,000
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	30,000,000	90 Orang	35,000,000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	33 organisasi	150,000,000	36 organisasi	150,000,000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten kota yang mendapatkan pelatihan	45 Lembaga	60,000,000	46 Lembaga	65,000,000

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	60,000,000	4 Unit	65,000,000
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	250,000,000	100%	259,500,000
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	50 Kasus	75,000,000	49 Kasus	77,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Perangkat Daerah	25,000,000	14 Perangkat Daerah	27,000,000
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan	15 Kasus	110,000,000	17 Kasus	110,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Layanan	110,000,000	6 Layanan	110,000,000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1 Lembaga	65,000,000	1 Lembaga	72,500,000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	50,000,000

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	22,500,000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang mendapat pengarahan terkait peningkatan kualitas keluarga	0.03 %	30,000,000	0.033 %	33,500,000
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan	1 Keg	30,000,000	1 Keg	33,500,000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Perangkat Daerah	30,000,000	17 Perangkat Daerah	33,500,000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	41.37 %	20,000,000	44.82 %	25,000,000
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data gender dan anak yang tersedia	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	25,000,000
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	25,000,000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga layanan anak yang telah mendapatkan advokasi	85%	75,000,000	90%	82,000,000
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan advokasi bagi lembaga layanan anak	2 Keg	35,000,000	2 Keg	37,000,000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 organisasi	35,000,000	33 organisasi	37,000,000



URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah yang telah menerapkan kriteria kabupaten layak anak	20 Perangkat Daerah	40,000,000	23 Perangkat Daerah	45,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	40,000,000	2 Dokumen	45,000,000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	264,600,000	100%	264,600,000
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa yang bekerja sama dengan pemkab dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	3 Lembaga	64,600,000	3 Lembaga	64,600,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	200 Orang	64,600,000	200 Orang	64,600,000
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan anak yang mendapatkan pelayanan	60 anak	200,000,000	61 anak	200,000,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	63 Orang	200,000,000	64 Orang	200,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			21,720,100,000		21,980,100,000
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total atau TFR	2.00 Angka	400,000,000	1.95 Angka	424,000,000
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	114,000,000
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	60,000,000

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	1 Keg	25,000,000	1 Keg	27,000,000
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1 Keg	25,000,000	1 Keg	27,000,000
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kelahiran Remaja atau ASFR	10.5 Angka	300,000,000	10.3 Angka	310,000,000
Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	12 Dokumen	50,000,000	12 Dokumen	60,000,000
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	250,000,000	12 Dokumen	250,000,000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	- Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP - Presentase Kampung KB yang terfasilitasi	43.50 % 85%	12,741,100,000	43.60 % 90%	12,966,100,000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK advokasi dan KIE serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	81%	12,741,100,000	82%	12,966,100,000
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	31%	2,720,000,000	31.05 %	2,845,000,000
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2 Dokumen	1,000,000,000	3 Dokumen	1,100,000,000
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	200,000,000	4 Dokumen	200,000,000
			550,000,000		575,000,000

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	3 Laporan		4 Laporan	
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Laporan	850,000,000	12 Laporan	850,000,000
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	120,000,000	2 Laporan	120,000,000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang siap melayani KB MKJP	60%	5,021,100,000	62%	5,021,100,000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang siap melayani KB MKJP	60%	5,021,100,000	62%	5,021,100,000
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12 Laporan	71,100,000	12 Laporan	71,100,000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	92930 Orang	3,700,000,000	93000 Orang	3,700,000,000
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	10 Unit	1,100,000,000	10 Unit	1,100,000,000
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	150,000,000	2 Laporan	150,000,000
			5,000,000,000		5,100,000,000

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah stakeholders atau pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBP	23 Lembaga		25 Lembaga	
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	170 Kampung	5,000,000,000	180 Kampung	5,100,000,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran PBI	73%	8,579,000,000	73.10 %	8,590,000,000
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI	90000 Orang	8,579,000,000	90100 Orang	8,590,000,000
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	20 Unit	400,000,000	20 Unit	400,000,000
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1269 Kelompok	8,100,000,000	1269 Kelompok	8,100,000,000
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	39,000,000	1 Laporan	40,000,000
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	25 Keluarga	40,000,000	30 Keluarga	50,000,000
NON URUSAN			8,812,651,000		9,242,731,000
NON URUSAN			8,812,651,000		9,242,731,000
			8,812,651,000		9,242,731,000

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%		100%	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	40,000,000	4 Dokumen	41,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	20,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	21,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Dokumen	4,350,000,000	3 Dokumen	4,455,000,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4,200,000,000	33 Org/bulan	4,300,000,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	150,000,000	3 Dokumen	155,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis	977,000,000	7 Jenis	1,013,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	30,000,000	2 Paket	35,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	60,000,000	3 Paket	63,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	22,000,000	2 Paket	25,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	370,000,000	5 Paket	380,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	50,000,000	7 Paket	55,000,000

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210 Laporan	435,000,000	215 Laporan	445,000,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	10,000,000	5 Dokumen	10,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	285,000,000	3 Jenis	297,000,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	25,000,000	4 Unit	27,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	230,000,000	12 Unit	235,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30,000,000	3 Unit	35,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	2,415,000,000	3 Jenis	2,661,731,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85,000,000	12 Laporan	86,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	35,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,300,000,000	12 Laporan	2,540,731,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	745,651,000	4 Jenis	775,000,000
			355,651,000		360,000,000

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	130 Unit		130 Unit	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	40,000,000	5 Unit	45,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	170,000,000	13 Unit	180,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	180,000,000	3 Unit	190,000,000
UPTD			135,000,000		135,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			100,000,000		100,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			100,000,000		100,000,000
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	100,000,000	100%	100,000,000
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 Lembaga	100,000,000	1 Lembaga	100,000,000
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000
NON URUSAN			35,000,000		35,000,000
NON URUSAN			35,000,000		35,000,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100%	35,000,000	100%	35,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Jenis	25,000,000	3 Jenis	25,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5,000,000		5,000,000

URUSAN/ URUSAN BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
		TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Jenis	10,000,000	1 Jenis	10,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10,000,000	12 Laporan	10,000,000



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2024. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja DPPKBP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2024, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja DPPKBP3A Tahun 2024 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. DPPKBP3A dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja DPPKBP3A Tahun 2024 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2024 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas 2025 Sejahtera, Mandiri, Maju, dan Berdaya Saing serta Lestari”**.

Purwokerto, 10 Juli 2023

KEPALA DPPKBP3A  
KABUPATEN BANYUMAS



KRISIANTO, A.P.  
Pembina Tingkat I

NIP. 19740321 199501 1 001